

## ABSTRAK

Dalam penelitian ini mengarah kepada rekonstruksi hukum peran Laboratorium forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan yaitu mengarah pada peran Laboratorium forensik Polri sebagai pendukung pembuktian secara ilmiah di pengadilan, peranannya dimulai sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada akhirnya tahap penetapan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis peran Laboratorium forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang saat ini belum berbasis nilai keadilan (2) Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan yang timbul pada pelaksanaan peran Laboratorium forensik Polri dalam sistem peradilan pidana saat ini belum berbasis nilai keadilan dan (3) Untuk merumuskan rekonstruksi hukum peran Laboratorium forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah (1) Paradigma penelitian dengan paradigma konstruktif (2) Jenis penelitian dengan pendekatan *juridis empiris*, dan sumber data dari data primer, skunder dan tersier (3) Analisa data dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Peran Laboratorium forensik Polri sangat signifikan terhadap pembuktian secara ilmiah namun secara umum belum berbasis nilai keadilan karena dipengaruhi oleh faktor elemen substansi, elemen struktur dan elemen kultur (2) Kelemahan-kelemahan pada elemen substansi yaitu multi tafsir pada alat bukti keterangan ahli dan surat, pada elemen struktur adalah belum terbentuknya Laboratorium forensik Polri di setiap Polda, dan elemen kultur adalah Laboratorium forensik Polri belum diberdayakan dengan maksimal, akibatnya tindak pidana yang terjadi belum sepenuhnya terdukung oleh pembuktian secara ilmiah (3) Merumuskan rekonstruksi hukum pada elemen substansi Pasal 184 (1) UU No.8 tahun 1981 KUHAP tentang alat bukti, yaitu menambah butir ke dalam alat bukti "Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik" merupakan butir ke 6 (enam), pada elemen struktur membentuk Laboratorium forensik Polri di semua Polda dan elemen kultur adalah memberdayakan Laboratorium forensik Polri dengan strategi membangun elemen substansi dan elemen struktur terlebih dahulu, dengan begitu maka peran Laboratorium forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan akan terwujud.

Kata Kunci : Rekonstruksi Hukum, Peran Laboratorium forensik Polri, Sistem Peradilan Pidana, Nilai Keadilan.

## ABSTRACT

This research focuses on the legal reconstruction of the role of Indonesian National Police Forensic Laboratory in the criminal justice system based on fairness values, which leads to its role as a scientific support of evidence in court. The role starts from the inquiry, investigation, prosecution, and eventually the determination stage.

The objectives of this research are (1) To analyze the role of Indonesian National Police Forensic Laboratory in the criminal justice system which is currently not based on fairness values (2) To analyze the weaknesses that arise in the implementation of the role of Indonesian National Police Forensic Laboratory in the criminal justice system which is currently not based on fairness values and

To formulate a legal reconstruction of the role of Indonesian National Police Forensic Laboratory in the criminal justice system based on justice values. The research methods used are (1) research paradigm with a constructive paradigm (2) research type of empirical juridical approach with primary, secondary and tertiary data sources (3) data analysis with qualitative approach .

The results of this research are (1) The role of the National Police Forensic Laboratory is very significant to scientific evidence but in general it is not yet based on the fairness value because it is influenced by substance elements, structural elements and culture elements (2) the weakness in substance elements consists of multi interpretations of evidence in expert statements and letters, in structural elements is that National Police forensic Laboratory is not yet formed in each Regional Police, and in cultural element is that the National Police Forensic Laboratory has not been maximally empowered. As a result, the criminal acts have not been fully supported by scientific evidence (3) Formulating legal reconstruction in substance elements in Article 184 (1) Law No.8 of 1981 of the Criminal Procedure Code concerning evidence, which is by adding items to the evidence "Forensic Laboratory Examination Results" in item 6 (six), in structural elements is by forming the Indonesian National Police Forensic Laboratory in all Regional Police, and in cultural elements is by empowering Indonesian National Police forensic Laboratory whose strategy is initially building substance elements and structural elements, so that the role of the Indonesian National Police Forensic Laboratory in the criminal justice system based on fairness values will be realized.

**Keywords:** Legal Reconstruction, The Role of the National Police Forensic Laboratory, Criminal Justice System, Fairness Value.